

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia karena berfungsi sebagai penyedia pangan, pakan untuk ternak dan bioenergy. Selain itu berperan pula dalam menopang pembangunan nasional, terutama mewujudkan ketahanan pangan, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Peran lainnya yaitu mendorong peningkatan daya saing melalui pertumbuhan agroindustry hilir dan memacu ekspor komoditas pertanian untuk meningkatkan devisa Negara. Tidak hanya pada masa sekarang, ke depan sector pertanian masih diandalkan sebagai sektor yang menyediakan kebutuhan pangan masyarakat. Tugas penyediaan pangan masyarakat tidak ringan, karena diperkirakan penduduk Indonesia pada tahun 2050 mencapai 322 juta jiwa, terbesar kelima di dunia setelah Tiongkok, India, Nigeria dan Amerika (United nations, 2017).

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden no. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu tahun 2021 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2021, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu pada tahun mendatang. Pelaporan

kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja OPD dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA PALU** dibentuk melalui Peraturan Walikota Palu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Mengatur rincian tugas, fungsi dan tata kerja dinas daerah, merupakan upaya agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis. Berdasarkan Peraturan Walikota Palu Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan dinyatakan bahwa *“Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang pertanian, ketahanan pangan, perikanan dan tugas yang diberikan Wali Kota”*.

Pada Tahun 2021 Walikota Palu menetapkan target kinerja yang ingin dicapai, yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang aman, nyaman, dan berketahanan bencana
3. Meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik

Dalam rangka mengetahui pencapaian kinerja dan untuk mewujudkan pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara bidang pertanian, serta kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan perencanaan strategis dan untuk mengetahui akuntabilitas kinerja maka perlu dibuat Laporan Kinerja yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi setiap akhir tahun.

## **2. Gambaran Umum Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu**

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu (DPKP) dibentuk berdasarkan peraturan daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana di atur dalam Peraturan Walikota Palu Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang

Pertanian dan Ketahanan Pangan, yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku.

### **3. TUGAS DAN FUNGSI**

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu sebagai Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) di Jajaran Pemerintahan Daerah Kota Palu yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan. OPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu perlu melakukan perumusan kebijakan teknis pembangunan dan pengembangan, penyusunan rencana dan program, pengumpulan dan pengolahan data, pengelolaan perizinan dan pelayanan pada bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu mempunyai fungsi :

- a) Melakukan pelaksanaan pembinaan kewenangan dan kebijakan di bidang pertanian dan ketahanan pangan yang diberikan kepala daerah.
- b) Penyusunan rencana pembangunan, pengawasan dan pengendalian di bidang pertanian dan ketahanan pangan.
- c) Penyusunan hasil pemantauan, laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian dan ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah
- d) Penyusunan standar pembibitan yang menjadi kewenangan daerah
- e) Penyusunan standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian dan ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah.
- f) Penyusunan program Diklat SDM/aparat pertanian dan ketahanan pangan yang meliputi teknis fungsional, keterampilan dan kejuruan.
- g) Melakukan pembinaan, pengawasan dan perijinan serta pembinaan usaha pertanian dan ketahanan pangan.
- h) Melakukan pengkajian dan penerapan teknologi pertanian dan ketahanan pangan
- i) Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas.
- j) Menyelenggarakan usaha pengelolaan di bidang pertanian dan ketahanan pangan
- k) Pengelolaan unit pelaksana Teknis Dinas

Dalam penyelenggaraan kewenangan tersebut Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan bidang pertanian, ketahanan pangan dan perikanan
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pertanian, ketahanan pangan dan perikanan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian, ketahanan pangan dan perikanan
4. Pelaksanaan administrasi bidang pertanian, ketahanan pangan dan perikanan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

Adapun struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu dipimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi :

1. Sekretariat yang terdiri dari :
  - Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
  - Sub Bagian Keuangan dan Aset
  - Sub Bagian Perencanaan Program
2. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan yang terdiri dari:
  - Seksi Ketersediaan Pangan
  - Seksi Distribusi Pangan
  - Seksi Kerawanan Pangan
3. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan yang terdiri dari :
  - Seksi Konsumsi Pangan
  - Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
  - Seksi Keamanan Pangan
4. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang terdiri dari :
  - Seksi Perbibitan dan Produksi
  - Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
  - Seksi Pengolahan dan Pemasaran
5. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terdiri dari :
  - Seksi Tanaman Pangan
  - Seksi Hortikultura
  - Seksi Perkebunan
6. Bidang Perikanan
  - Seksi Perikanan Budidaya

- Seksi Perikanan Tangkap
- Seksi Pelayanan Usaha dan Perikanan
- 7. Bidang Penyuluhan
  - Seksi Kelembagaan
  - Seksi Ketenagaan
  - Seksi Metode dan Info
- 8. UPTD Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan
- 9. UPTD Rumah Potong Hewan
- 10. UPTD Balai Benih Ikan
- 11. UPTD Lembaga Penerapan Teknologi

#### **4. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, sebagai berikut :

**Bab I – Pendahuluan**, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

**Bab II – Perencanaan Kinerja**, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

#### **Bab III – Akuntabilitas Kinerja**

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

**Bab IV – Penutup**, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB II

### PERENCANAN KINERJA

#### 2.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara mendalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu serta Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPMJD Tahun 2021-2026 dan RPJMD perubahan Kota Palu Tahun 2021-2026. Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1.1 Penetapan Kinerja Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Tahun 2021 Berdasarkan RPJMD 2021-2026**

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Keterangan/penjelasan formulasi
1	2	3
I. Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nilai SAKIP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nilai SAKIP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu

<p>2. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan</p>	<p>Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB (%)          Produktivitas pertanian per hektar per tahun (ton/ha)          Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular          Jumlah Total Produksi Perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten /kota (ton)</p>	<p>PDRB ADH sektor Pertanian dan Perikanan</p> $\frac{\Sigma \text{ produksi pertanian pangan pertahun} \times 100\%]}{\text{Luas Lahan}}$ $\frac{\Sigma \text{ kejadian tahun berjalan (t)} - \Sigma \text{ kejadian tahu lalu (t - 1)} \times 100\%}{\Sigma \text{ kejadian tahu lalu (t - 1)}}$ <p><i>Σ Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)</i></p>
<p>3. Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat Kota Palu</p>	<p>Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)          Ketersediaan Energi (Kkal/Kap/Hari)          Ketersediaan protein (Gram/ Kap/ Hari)          Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH)</p>	$\frac{\text{Ketersediaan Pangan utama} \times 100\%}{\text{Kebutuhan Pangan utama}}$ <p>Nilai Ketersediaan pada Neraca Bahan Makanan (NBM)</p> <p>Nilai Ketersediaan pada Neraca Bahan Makanan (NBM)</p> <p>Nilai Konsumsi pada Neraca Bahan Makanan (NBM)</p>

## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu telah membuat perjanjian kinerja tahun 2021 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Oleh karena itu indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah indikator kinerja utama tingkat Organisasi Perangkat Daerah Kota Palu yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra 2016 - 2021 dan Renstra 2021 - 2026 Dinas Pertanian dan Ketahanan Kota Palu.

**Tabel 2.2.1 Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Tahun 2021 Berdasarkan RPJMD 2021 - 2026**

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Keterangan/penjelasan formulasi
2	3	4
1. Meningkatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	CC
	Nilai SAKIP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu	BB
2. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan	Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB (%)	4,06%
	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (ton/ha)	5,57%
	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	2,00
	Jumlah Total Produksi Perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten /kota (ton)	1172,87 ton
3. Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat Kota Palu	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	143%
	Ketersediaan Energi (Kkal/Kap/Hari)	3069
	Ketersediaan protein (Gram/ Kap/ Hari)	72,17
	Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	91,19

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu**

Evaluasi kinerja tidak hanya menganalisis perbandingan antara target dengan realisasi kinerja, tetapi juga membandingkan pencapaian kinerja tahun 2021 dengan kinerja beberapa tahun sebelumnya, terhadap target akhir jangka menengah, dan menganalisis nilai efisiensi atas penggunaan sumber daya. Selain itu evaluasi kinerja juga mencari akar permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum memenuhi harapan, sehingga diperoleh solusi rekomendasi serta rencana perbaikan di tahun berikutnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya perbaikan kinerja, sehingga peningkatan kinerja secara berkesinambungan (*continuous improvement*) dapat terwujud.

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Tahun 2021-2026 memiliki 3 Sasaran Strategis dan 5 Indikator Kinerja. Keberhasilan pencapaian 5 Indikator Kinerja tersebut diukur melalui 2 jenis target yaitu *maximize* target dan *minimize* target. *Maximize* target adalah apabila hasil yang dicapai dibandingkan dengan target nilainya semakin besar, maka semakin baik kinerjanya. Sebaliknya, yang dimaksud dengan *minimize* target adalah apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target semakin kecil, maka semakin baik kinerjanya.

##### **3.1.1 Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Berdasarkan RPJMD 2016 -2021**

Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2021 berdasarkan RPJMD 2016 - 2021 di gambarkan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.1 Capaian IKU Tahun 2021 Berdasarkan RPJMD 2016 – 2021**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	2	3	4	5
1. Meningkatnya Capaian Indikator Ketahanan Pangan	Rasio Capaian Indikator Ketahanan Pangan	1.5 %	0,97	64.67 %
2. Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	- Rasio Capaian produksi tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	1.5 %	1.00	66.67 %
	- Rasio Capaian produksi peternakan	1.7 %	1.01	59.41 %
	- Rasio Capaian produksi perikanan	1.4 %	1.11	79.29 %
3. Meningkatnya produksi olahan pertanian dan perikanan	Rasio Capaian produksi olahan hasil pertanian dan perikanan	1,0 %	1.00	100 %

Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan capaian kinerja dari indikator kinerja utama dalam sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Berdasarkan tabel diatas, dapat diuraikan capaian kinerja dari indikator kinerja utama dalam sasaran strategis adalah sebagai berikut :

- Pada sasaran strategis Meningkatnya Capaian Indikator Ketahanan Pangan dengan rasio capaian indikator ketahanan pangan menunjukkan 64,67 % capaian kinerja tidak mencapai target kinerja yang diperjanjikan, hal ini disebabkan karena kondisi pandemic covid-19.
- Sasaran Strategis Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan dengan capaian produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan menunjukkan 66,67 % capaian kinerja tidak mencapai target kinerja yang diperjanjikan, hal ini dikarenakan adanya alih fungsi lahan

- Sasaran Strategis Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan dengan capaian produksi peternakan menunjukkan 59,41 % capaian kinerja tidak mencapai target kinerja yang diperjanjikan, akan tetapi untuk populasi peternakan mengalami kenaikan.
- Sasaran Strategis Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan dengan capaian produksi perikanan menunjukkan 79,29 % capaian kinerja mencapai target kinerja yang diperjanjikan, kenaikan yang signifikan terjadi pada perikanan tangkap
- Sasaran Strategis Meningkatnya produksi olahan pertanian dan perikanan dengan capaian produksi olahan hasil pertanian dan perikanan menunjukkan 100 % capaian kinerja telah mencapai target kinerja yang diperjanjikan, untuk minyak kelapa sehat mengalami kenaikan sedangkan bawang goreng dan abon masih tetap sama dari tahun sebelumnya

**Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021**

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2020		Tahun 2021	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	4		4	
1. Meningkatnya Capaian Indikator Ketahanan Pangan	Rasio Capaian Indikator Ketahanan Pangan	1.00	81.30 %	0.97	64.67 %
2. Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	Rasio Capaian produksi tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	1.00	50.00 %	1.00	66.67 %
	Rasio Capaian produksi peternakan	1.28	42.67 %	1.01	59.41 %
	Rasio Capaian produksi perikanan	0.36	36.00 %	1.11	79.29 %
3. Meningkatnya produksi olahan pertanian dan perikanan	Rasio Capaian produksi olahan hasil pertanian dan perikanan	1.00	50.00 %	1.00	100 %

--	--	--	--	--	--

Berdasarkan Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021 dapat dilihat bahwa realisasi dan capaian pada tahun 2021 terdapat indikator yang menurun yaitu ketahanan pangan, sedangkan indikator yang lainnya mengalami kemaiakan yaitu indikator peternakan, olahan hasil pertanian dan perikanan.

### **3.1 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Tercapai dan tidak tercapainya indikator kinerja utama disebabkan antara lain :

- a. Adanya saling kerjasama antara pemerintahan dan masyarakat dalam meningkatkan produktivitas pertanian
- b. Terpenuhinya benih dan pupuk untuk memaksimalkan pertumbuhan tanaman pertanian
- c. Adanya bantuan ternak yang diberikan masyarakat yang menyebabkan peningkatan populasi ternak
- d. Konsumsi pangan mengalami penurunan disebabkan karena adanya pandemic covid-19
- e. Adanya pandemi menghambat pengiriman benih ikan dan pakan ikan, sementara pasokan benih ikan dan pakan ikan yang ada di Kota Palu terbatas dan tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sehingga untuk mempertahankan/mengatasi hal tersebut diperlukan solusi antara lain :

- a. Menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah berbasis IT
- b. Memperbaiki pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara konsisten untuk menjamin pencapaian kinerja perangkat daerah
- c. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya peranan masyarakat dalam pembangunan pertanian berkelanjutan
- d. Memperbaiki sarana prasarana penunjang kegiatan pertanian dan perikanan.

#### **3.1.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Aspek efesiensi penggunaan sumber daya yang di maksudkan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara capaian target kinerja tahun 2021 dengan realisasi anggaran tahun 2021. Sejauh mana realisasi penggunaan anggaran yang digunakan dalam upaya mencapai target kinerja yang di inginkan tahun 2021. Realisasi anggaran tahun 2021 untuk 12 program dan 40 sub kegiatan sebesar Rp. 20.004.221.836,- atau (94,93%) dari target anggaran

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) tahun 2021 sebesar Rp. 21.072.172.848,- terdapat efisiensi penggunaan anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 1.067.951.012,-

Rincian realisasi penggunaan anggaran tahun 2021 pada tabel berikut :

**Table 3.4 Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2021**

<b>Uraian</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>(%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	686.771.225	621.145.225	90,44
Program Penanganan Kerawanan Pangan	626.604.792	599.174.900	95,62
Program Pengawasan Keamanan Pangan	52.936.400	44.763.000	84,56
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	324.722.000	324.676.000	99,99
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.127.506.800	1.001.928.880	88,86
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	387.365.000	385.290.000	99,46
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.879.487.045	13.172.228.317	94,90
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.185.072.780	2.063.256.807	94,43
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	730.451.571	665.140.381	91,06
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	399.837.760	397.859.160	99,51
Program Perizinan Usaha Pertanian	47.080.775	45.078.375	95,75
Program Penyuluhan Pertanian	624.336.700	553.783.450	88,70

### **3.1.4 Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

**Tabel 3.5 Realisasi dan Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021**

<b>Uraian</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target 2021</b>	<b>Realisasi 2021</b>	<b>Capaian</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Cakupan Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	12 bulan	12 bulan	100%
Penanganan Kerawanan Pangan	Cakupan Penanganan Kerawanan Pangan	34000 Kg	34000 Kg	100%
Pengawasan Keamanan Pangan	Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan	1 Paket	1 Paket	100%
Pengelolaan Perikanan Tangkap	Cakupan Pengelolaan Perikanan Tangkap	28 Paket	28 Paket	100%
Pengelolaan Perikanan Budidaya	Cakupan pengelolaan perikanan budidaya	3 Keg	3 Keg	100%
Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Cakupan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	2 Paket	2 Paket	100%
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	75 item	73 item	97,00%
Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Cakupan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	3 kegiatan	3 kegiatan	100 %
Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	300 Ha	255 Ha	84,92%

Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	2750 Ekor	2550 Ekor	92,31%
Perizinan Usaha Pertanian	Cakupan Perizinan Usaha Pertanian	11 item	11 item	100%
Penyuluhan Pertanian	Cakupan Penyuluhan Pertanian	24 item	24 item	100%

### 3.2 Realisasi Anggaran

#### 3.2.1 Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program, yang mana dana tersebut merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan. Anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu melalui APBD pada Belanja Langsung Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp. 10.220.569.496,- (**Sepuluh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah**) terdiri atas belanja pegawai, barang dan jasa dan modal. Alokasi belanja seluruhnya merupakan belanja rupiah murni. Realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 mencapai 93,33% atau Rp. 9.538.668.435,- (*Sembilan Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*). Adapun realisasi anggaran 2021 berdasarkan program kegiatan secara rinci terlihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel. 3.6 Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2021**

No	Program/Kegiatan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Keuangan %
1	2	3	4	5
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>10.220.569.496</b>	<b>9.538.668.435</b>	<b>93,33</b>
	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>			
1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	16.089.225	16.089.225	100

2	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	24.226.600	23.140.000	95,51
3	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	86.455.400	40.366.000	46,69
4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	560.000.000	542.000.000	96,79
<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>				
5	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	626.604.792	600.619.800	95,85
<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>				
6	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	52.936.400	44.763.000	84,56
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>				
7	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	324.722.000	324.676.000	99,99
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>				
8	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.075.316.400	1.001.926.800	93,18
9	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	52.190.400	52.150.400	99,92
<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>				
10	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	387.365.000	385.290.000	99,46
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				
11	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.662.275	7.662.275	100

12	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.587.500	7.587.500	100
13	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.587.500	7.587.500	100
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.131.000	7.131.000	100
15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.262.030	1.254.000	99,36
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.490.030	41.700.000	98,14
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.639.100	64.639.100	100
18	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.804.325	12.433.625	97,10
19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.900.000	6.900.000	100
20	Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.250.000	21.250.000	100
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	293.358.000	281.655.850	96,01
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	187.500.000	182.853.041	97,52
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.607.311.933	1.456.936.666	90,64
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	650.300.000	572.141.400	87,98
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	95.700.000	86.429.900	90,31
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.200.000	13.200.000	100
27	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.200.000	1.200.000	100
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>				
28	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	25.720.870	21.381.946	83,13

29	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	49.042.840	31.618.400	64,47
30	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1.373.924.600	1.296.993.300	94,40
31	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	736.384.470	714.653.261	97,05
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>				
32	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	704.930.541	649.947.001	92,20
33	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	25.521.030	17.012.380	66,66
<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>				
34	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	98.736.900	98.736.900	100
35	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	301.100.860	300.922.260	99,94
<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>				
36	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	47.080.775	46.960.775	99,75
<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>				
37	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	235.838.400	179.290.000	76,02
38	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	267.449.000	264.540.750	98,91
39	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	121.049.300	117.247.700	96,86

### 3.2.2 Belanja Tidak Langsung

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Tahun 2021 mendapat anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 10.851.603.352,- sedangkan realisasinya sebesar Rp. 10.465.553.401,- atau 96,44% yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Uraian	Pagu 2021	Realisasi	
		(Rp)	(%)
1	2	3	4
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>10.851.603.352</b>	<b>10.465.553.401</b>	<b>96,44</b>
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>10.851.603.352</b>	<b>10.465.553.401</b>	<b>96,44</b>
<b>Belanja Gaji dan Tunjangan</b>			
Gaji pokok PNS	5.965.007.604	5.887.700.104	98,70
Tunjangan Keluarga	545.669.664	538.550.465	98,70
Tunjangan Jabatan	327.669.996	308.480.000	94,14
Tunjangan Fungsional	419.839.996	419.820.000	99,99
Tunjangan Fungsional Umum	114.505.008	112.345.000	98,11
Tunjangan Beras	342.763.860	341.097.926	99,51
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	32.087.004	31.910.439	99,45
Pembulatan Gaji	129.792	85.252	65,68
Iuran Jaminan Kesehatan	356.331.444	337.703.013	94,77
Iuran Jaminan Kecelakaan	15.001.332	13.102.150	87,34
Iuran Jaminan Kematian	41.954.436	36.256.773	86,42
Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat	27.025.016	0	0
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.657.618.200	2.432.502.279	91,53
Insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha RPH	6.000.000	6.000.000	100

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Secara umum rata-rata capaian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Pengukuran Kinerja adalah berhasil mencapai target dari target renstra yang telah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Capaian indikator ketahanan pangan mengalami penurunan yang diakibatkan pandemic covid-19 yang belum berakhir
- 2 Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (padi) mengalami kenaikan sedangkan jagung dan bawang merah mengalami penurunan
- 3 Populasi ternak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya
- 4 Kinerja perikanan menunjukkan angka 107,77% (sangat berhasil), untuk produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan sedangkan produksi perikanan budidaya mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan.
- 5 Realisasi keuangan APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu tahun 2021 baik yang Belanja Tidak Langsung (BTL) maupun Belanja Langsung (BL) yaitu sebesar Rp. 20.004.221.836 (94,93%), dari 12 program 39 sub kegiatan.

Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 sesuai dengan Rencana Strategis. Dari hasil capaian indikator kinerja tahun 2021-2026 dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan Sasaran Strategis. Dari hasil capaian indikator kinerja tahun 2021 tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya pelaksanaan program dan sub kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu sudah baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan, walaupun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

## 4.2 Saran

1. Perlu upaya dan komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
2. Perlu dibangun mekanisme pengumpulan data kinerja yang baik sehingga proses pengukuran kinerja dapat berjalan baik serta menjadi umpan balik dalam mengevaluasi capaian kinerja atas kebijakan dan program yang dilakukan.

Laporan akuntabilitas kinerja ini bersifat terbuka untuk diperbaiki terus menerus dimasa akan datang. Diharapkan dapat digunakan sebagai acuan kinerja berbagai pihak dilingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu. Adapun realisasi kinerja dinas secara keseluruhan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang dijalankan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu. Demikian laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu tahun 2021. Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.